

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN DAN DESA SAMBENG, KECAMATAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG

Aditya Pangestu¹
Rudy Badrudin^{2*}

¹Undergraduate Student Program, Department of Accounting

²Department of Master Management

^{1,2}YKPN School of Business (STIE YKPN), Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author; *E-mail*: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the effect of accountability, transparency, and competence of village fund management government officials on improving community welfare in Deyangan Village, Mertoyudan District and Sambeng Village, Borobudur District, Magelang Regency. The type of data used is primary data obtained through the distribution of questionnaires with google form. The respondents were the people of Deyangan Village and Sambeng Village. The number of respondents obtained is 78 people. The data were processed by descriptive analysis techniques and using SPSS tools. The results of the study show that (1) Village Fund Accountability has a positive effect on Community Welfare in Deyangan Village, Mertoyudan District, Magelang Regency (2) Village Fund Transparency has no significant effect on Community Welfare in Deyangan Village, Mertoyudan District, Magelang Regency. (3) Competence of Village Fund Management Government officials has a positive effect on Community Welfare in Deyangan Village, Mertoyudan District, Magelang Regency (4) Village Fund Accountability has no significant effect on Community Welfare

in Sambeng Village, Borobudur District, Magelang Regency (5) Village Fund Transparency has an effect not significant to Community Welfare in Sambeng Village, Borobudur District, Magelang Regency (6) The Competence of Village Fund Management Government officials has insignificant effect on Community Welfare in Sambeng Village, Borobudur District, Magelang Regency.

Keywords: village fund management, accountability, transparency, competence of village fund management government officials, improving community welfare

JEL Classification: H72

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar asas otonomi yang menjunjung tinggi prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat tercapainya kes-

kejahteraan masyarakat melalui prinsip atau sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat pedesaan melalui pembangunan daerah atau pembangunan desa. Desa berhak untuk mengatur pemberdayaan dan kebutuhan masyarakat sekaligus pemerintahannya dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan agar tercapai kesejahteraan desa juga memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa (DD) dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing desa dan setiap desa diberi hak penuh dalam mengelola dana desa secara mandiri. Dana Desa bersumber dari APBN yang disalurkan melalui pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota.

Dengan jumlah anggaran Dana Desa yang cukup besar, pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa sering terjadi kecurangan dan pelakunya merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh warga desa dengan tujuan membangun Desa agar lebih baik (Kuswanti & Kurnia, 2020). Kesadaran aparat pengelola Dana Desa untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum menjadi faktor penting agar tercapai masyarakat yang sejahtera. Agar pelaksanaan lebih terarah dan akuntabel dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa pemerintahannya, diperlukan perangkat desa yang profesional dengan sarana dan prasarana yang memadai (Manik *et al.*, 2020).

Kementerian Dalam Negeri dengan bantuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan serta memberi arahan sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Akuntabilitas menjadi peran penting dalam pengelolaan Dana Desa sebagai pertanggungjawaban atas kinerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas yaitu sebuah wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat desa terhadap kinerja aparat pemerintahan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenangnya dalam mengelola dana atau anggaran yang diberikan (Sari & Wahidahwati, 2018).

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengetahui seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk Pemerintahan Desa. Sikap pemerintah desa dengan cara keterbukaan terhadap masyarakat sehingga mereka mendapatkan informasi

secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip atau asas transparansi. Transparansi adalah prinsip untuk menciptakan rasa saling percaya antara pihak pemerintah dengan masyarakat atas kemudahan dan keterbukaan informasi untuk mengakses informasi terkait.

Selain akuntabilitas dan transparansi, hal lain seperti kompetensi aparatur desa juga harus mendapat perhatian lebih dalam mengelola Dana Desa. Kompetensi tidak hanya merujuk keahlian di satu bidang, melainkan kemampuan atau keinginan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga dapat memberikan manfaat. Dalam pembangunan desa, proses kinerja aparat desa yang kurang baik akan mempengaruhinya, sehingga kompetensi aparatur desa harus selaras dengan tujuan pembangunan desa (Fauzie *et al.*, 2020).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara principal dengan agent yang memiliki tujuan untuk berkerja sama. Hubungan keagenan melibatkan kontrak antara principal dengan agent melalui pemberian wewenang untuk memiliki hak pengambilan keputusan kepada pihak agent terkait (Jensen & Meckling, 1976). teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu seakan-akan memiliki kepentingan sendiri sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* sehingga berusaha untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing. Dalam teori keagenan diaplikasikan pada masyarakat yang berperan sebagai *principal* dan pemerintah desa berperan sebagai *agent*. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam mengelola Dana Desa. Pemerintah desa dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, adil, dan amanah sesuai dengan prinsip *good governance*.

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776) proses pertumbuhan ekonomi memiliki dua bagian, pertama adalah pertumbuhan *output* total lalu bagian kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan *output* total terdapat aspek yang meliputi jumlah penduduk, stok barang modal, dan sumber daya alam (Arsyad, 2010). SDA digunakan

seluruhnya optimal dapat menghentikan pertumbuhan output, jika tidak maka penduduk dan stok modal masih berpengaruh pada pertumbuhan output.

Menurut Solow-swan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja (Sukirno, 2006). Hal itu sering disebut dengan teori Neo-Klasik yang dikembangkan dari teori Charles Cobb dan Paul Douglas. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ada syarat-syarat yang dibutuhkan agar dapat terlaksana dengan baik. Teori yang dikembangkan oleh Harrod-Dorman menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan output sejalan dengan rasio tabungan-pendapatan. Rasio tersebut menggambarkan pertumbuhan *output* berhubungan dengan rasio tabungan-pendapatan. Rasio tersebut juga menggambarkan rasio modal-*output* berhubungan negatif dengan pertumbuhan *output*.

Teori Nicholas Kaldor menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok. Kelompok masyarakat kapitalis (Boediono, 1992:82-85) dan kelompok masyarakat buruh (Djojohadikusumo, 1994:49-52). Nicholas Kaldor juga mengungkapkan bahwa masyarakat dapat dikelompokkan berdasar wilayah yaitu penduduk pedesaan dan perkotaan. Di sisi lain ia juga membagi kelompok berdasarkan bidang pekerjaan yaitu kelompok penduduk dengan pekerjaan pada bidang industri/jasa dan sektor pertanian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD yaitu bentuk rencana keuangan yang didapatkan sekaligus digunakan Pemerintah Daerah berguna dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum selama satu tahun anggaran ataupun sesuai dengan ketetapan pemerintah. APBD diselenggarakan melalui pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Penyusunan APBD disetujui pemerintah daerah bersama DPRD sehingga dapat disahkan dan ditetapkan pada peraturan daerah. Tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah dapat dilihat melalui APBD (Badrudin, 2017:98).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran penerimaan dan belanja desa (APBDes) yaitu sebuah putusan yang telah ditetapkan berlandaskan peraturan desa yang memuat tentang perkiraan sumber pendapatan dan belanja dalam keuangan tahunan

desa untuk mendukung program pembangunan desa (Sumpeno, 2011). Berdasarkan anggaran yang tersedia, pemerintahan desa dapat merancang rencana strategis dan terukur yang digunakan sesuai dengan tujuan APBDes. Dalam proses penganggaran desa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektifitas penyelenggaraan pemerintah, professional, dan kecepatan respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat (Sumpeno, 2011). Seluruh faktor tersebut semestinya dapat dilaksanakan dengan baik sehingga APBDes dapat tersalurkan secara maksimal bagi kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban dan penggambaran pemegang amanah terhadap kinerja organisasi termasuk pimpinan organisasi tersebut terhadap pihak yang membutuhkannya dalam bentuk laporan dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber dana atas dasar prinsip perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang wajib untuk diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya prinsip akuntabilitas diharapkan pada proses pengelolaan keuangan desa dapat memberikan laporan keuangan yang seluruh elemennya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional pemerintahan desa.

Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi merupakan bentuk pemberian akses secara terbuka terhadap informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat umum dan telah ditetapkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui proses pemerintah dalam mengelola keuangannya. Transparansi mengarah pada keterbukaan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Transparansi dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, sehingga masyarakat perlu untuk mengawasi proses dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah (Dewi & Sapari, 2020).

Kompetensi

Kompetensi merupakan sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya pada bidang tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi merupakan bentuk kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi dapat menjadi dasar bagi individu yang berkaitan dengan efektifitas dan kualitas kinerja dalam upaya menyelesaikan kewajiban/tugas. (Sudarmanto, 2009) memaparkan beberapa komponen dalam kompetensi, yaitu 1) *Knowledge*, merupakan pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh individu pada suatu bidang tertentu; 2) *Skill*, yaitu kemampuan yang terdapat pada seseorang guna menyelesaikan masalah secara fisik ataupun mental; 3) *Self concept*, merupakan bentuk sikap, nilai, dan citra yang dimiliki oleh diri seseorang; 4) *Traits*, merupakan karakteristik fisik dan respon atas informasi ataupun situasi tertentu; 5) *Motivation*, merupakan bentuk pemikiran atau kehendak seseorang yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan sehingga akan mengarahkan/menggerakkan individu.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah bentuk rasa aman, sentosa, dan makmur. Dengan kata lain masyarakat menjalani hidup dengan adanya keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Bentuk kesejahteraan dapat dicerminkan melalui tersedianya tempat tinggal yang layak huni, sandang dan pangan tercukupi, fasilitas pendidikan dan kesehatan mudah diakses. Pemerintah memiliki program pembangunan ekonomi dengan tujuan salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 yang memuat kesejahteraan sosial, dapat didefinisikan bahwa warga negara bisa menjalani hidup dengan layak dan mengembangkan diri sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan tercukupinya kebutuhan spiritual dan material.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban dan penggambaran pemegang amanah terhadap kinerja organisasi termasuk pimpinan organisasi tersebut terhadap pihak yang membutuh-

kannya dalam bentuk laporan dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber dana atas dasar prinsip perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Dalam proses mengelola keuangan desa khususnya Dana Desa, masyarakat berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban oleh pihak pengelola agar tujuan dari diadakannya Dana Desa dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian (Yupita & Juita, 2020) village policies and village institutions on community welfare. This type of research is quantitative penenlitian. The object of this research is Nagari Sungai Tanang. Sampling method used is stratified random sampling and data is processed by multiple linear regression analysis, validity test, realibility and hypothesis testing with F test and t test. The result of the research with the t-test of accountability management of Village Fund Allocation (ADD dan (Sari & Wahidahwati, 2018) mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat dijelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan, dapat dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H1: Akuntabilitas Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

Pengaruh Transparansi Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi adalah keterbukaan akses untuk memperoleh suatu informasi ekonomi maupun proses penggunaan sumberdaya publik yang dilaksanakan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2009). Pemerintahan yang secara transparan dalam memberikan informasi keuangan termasuk dalam mengelola Dana Desa kepada masyarakat akan menimbulkan rasa percaya di masyarakat kepada pemerintah atas kinerjanya. Penelitian (Dewi & Sapari, 2020) dengan menunjukkan hasil bahwa transparansi alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, masyarakat yang mendapatkan akses informasi secara mudah akan turut mengawasi proses pengelolaan Dana Desa. Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan, dapat dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H2: Transparansi Pengelola Dana Desa berpengaruh

positif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kompetensi yaitu bentuk karakteristik dasar yang dimiliki individu secara melekat di dalam kepribadian sehingga berguna sebagai kemampuan dasar untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan (Spencer & Spencer, 2007). Kompetensi dapat menjadi dasar bagi individu yang berkaitan dengan efektifitas dan kualitas kinerja dalam upaya menyelesaikan kewajiban/tugas. Dalam mengelola keuangan diperlukan keahlian tertentu agar dapat diselesaikan dengan baik. Sejalan dengan penelitian (Fauzie *et al.*, 2020), dalam penelitian ini menghasilkan kompetensi pendamping desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan, dapat dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H3: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian berjenis seperti ini dapat mendeskripsikan dan menggambarkan data sehingga dapat dianalisis secara sistematis dan akurat (Kumalasari & Riharjo, 2016) *implementation, report and responsibility of Village Allocation Fund. The research method has been carried out by using qualitative method and descriptive approach. The informant consists of village head, village secretary, village treasury, vice chairman of BPD, and representative of the community. The data collection technique has been conducted by using interview and documentary. The data analysis technique has been started by organizing the data, simplifying the data, processing the data analysis, and interpreting the result. The result of the research shows that the village government of Bomo Village Rogojampi District of Banyuwangi has implemented the transparency and accountability principles in the management of Village*

Fund Allocation (ADD. Penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Deyangan Kec Mertoyudan dan Desa Sambeng Kec Borobudur Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2015). Dalam pemilihan sampel harus dapat mewakili secara menyeluruh pada populasi. Penelitian ini menggunakan sampel warga Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan kriteria memiliki KTP atau berumur lebih dari 17 tahun dengan mengambil sampel melalui cara purposive sampling. Jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 78 orang, dan jumlah masing-masing yaitu Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan berjumlah 40 orang dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur 38 orang.

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan kuesioner, dengan bentuk pemberian pertanyaan terhadap responden yang disertai alternatif jawaban. Responden dapat memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya masing-masing sehingga hasilnya dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dibuat dalam format *online google forms* sehingga dapat diakses secara *online*. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan waktu yang berbeda untuk masing-masing desa agar lebih mudah. Skala *likert* dipilih oleh peneliti sebagai dasar skala pengukuran untuk mengukur tingkatan setuju/tidak setuju seseorang terhadap pernyataan. Variabel bebas atau yang disebut variabel independen yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi penyebab adanya perubahan (Sugiyono, 2015). Variabel independen pada penelitian ialah (X1) akuntabilitas, (X2) transparansi, dan (X3) kompetensi. Variabel terikat atau biasa disebut variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diakibatkan oleh variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel dependen pada penelitian (Y) kesejahteraan masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui validitas kuesioner dengan perbandingan nilai r hitung dengan r tabel. Jumlah seluruh responden yaitu 78 orang dengan tingkat signifikansi 0,05 dan nilai r tabel 0,23. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka kuesioner dapat dinyatakan valid. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas pada masing-masing variabel:

Pada Tabel 1 nampak semua pertanyaan kuesioner terkait variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dinyatakan valid. Hal tersebut diketahui

berdasarkan masing-masing nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel (0,23).

Pada Tabel 2 nampak semua pertanyaan kuesioner terkait variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa dinyatakan valid. Hal tersebut diketahui berdasarkan masing-masing nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel (0,23).

Pada Tabel 3 nampak semua pertanyaan kuesioner terkait variabel Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dinyatakan valid. Hal tersebut diketahui berdasarkan masing-masing nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel (0,23).

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa										
	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	TOTAL
r-hitung	0.70	0.64	0.60	0.68	0.61	0.56	0.46	0.59	0.55	1
r-tabel (78-2, 0.05)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
V/T	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

Transparansi Pengelolaan Dana Desa									
	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	TOTAL
r-hitung	0.59	0.64	0.72	0.57	0.66	0.76	0.64	0.58	1
r-tabel (78-2, 0.05)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
V/T	V	V	V	V	V	V	V	V	

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi

Kompetensi Pengelolaan Dana Desa										
	X31	X32	X33	X34	X35	X36	X37	X38	X39	TOTAL
r-hitung	0.76	0.65	0.75	0.58	0.68	0.41	0.42	0.63	0.72	1
r-tabel (78-2, 0.05)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
V/T	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat

	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat															
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL
r-hitung	0.47	0.55	0.59	0.59	0.72	0.71	0.52	0.73	0.76	0.58	0.70	0.48	0.74	0.66	0.60	1
r-tabel (78-2, 0.05)	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
V/T	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

Pada Tabel 4 nampak semua pertanyaan kuesioner terkait Variabel Kesejahteraan Masyarakat dinyatakan valid. Hal tersebut diketahui berdasarkan masing-masing nilai r-hitung yang lebih besar dari nilai r-tabel (0,23).

Uji Reliabilitas

Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengukur keandalan pertanyaan pada kuesioner dalam memberikan hasil yang tidak berbeda jauh. Data dapat dikatakan reliabel

jika memiliki nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,06.

Pada Tabel 5 nampak hasil uji reliabilitas *Cronbach's Alpha* menunjukkan semua variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,6. Berdasar uji yang dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparat pengelola dana desa, dan kesejahteraan masyarakat dinyatakan reliabel dan jawaban dari para responden dikategorikan konsisten dan stabil.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ketentuan	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,778	>0,6	Reliabel
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	0,796	>0,6	Reliabel
Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa	0,808	>0,6	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	0,888	>0,6	Reliabel

Uji Kualitas Model

Uji Goodness of Fit

Uji *Goodness of Fit* adalah sebuah pengujian dengan tujuan untuk menilai seberapa besar ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Hal tersebut dapat diukur dengan melihat nilai P value apakah lebih besar atau lebih kecil dari

0,05. Jika nilai P value kurang dari 0,05 ($P\ value < 0,05$) maka model layak untuk digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui nilai Uji *Goodness of fit* sebagai berikut:

Pada Tabel 6 nampak hasil uji *goodness of fit* diketahui nilai sig $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan model layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Goodness of fit

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3321.303	3	1107.101	34.858	0.000 ^b
Residual	2350.274	74	31.760		
Total	5671.577	77			

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi bermaksud untuk mengukur seberapa besar variabel independen suatu model dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Pada Tabel 7 nampak nilai *R square* 0,576 yang artinya 57,6% tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2, dan kompetensi (X3). Sedangkan sisanya sebanyak 42,4% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2, dan kompetensi (X3).

Pada Tabel 8 nampak nilai *R square* 0,015 yang artinya 1,5% tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kompetensi (X3). Sedangkan

sisanya sebanyak 98,5% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2, dan kompetensi (X3).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

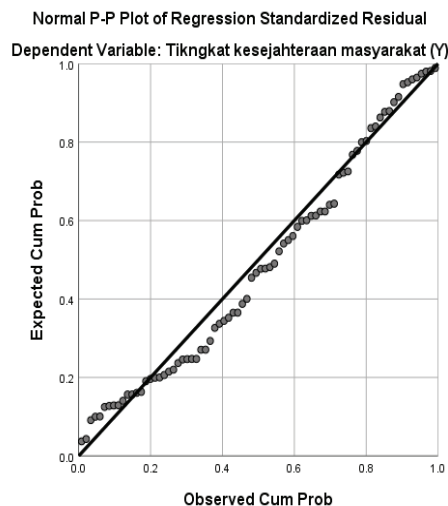
Uji normalitas memiliki tujuan untuk menilai data variabel penelitian yang digunakan dan diolah merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak normal dengan cara pengujian menggunakan *probability plot*. Suatu data pada *probability plot* dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila pola lingkaran kecil (ploting) berada pada garis diagonal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan *probability plot*:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Desa Deyangan

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin Watson</i>
1	0.759 ^a	0.576	0.541	5.630	1.339

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Desa Sambeng

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin Watson</i>
1	.121 ^a	.015	-.072	4.057	1.723



Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot

Pada Gambar 2 nampak hasil uji normalitas dengan *probability plot* dapat diketahui data *plotting* mempunyai pola mengikuti garis diagonal dan melebar tidak terlalu jauh. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diolah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada pengujian ini digunakan teknik uji multikolinearitas *tolerance* dan *variable inflation factor (VIF)*. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,100 dan nilai *variable inflation factor* kurang dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan:

Berdasar hasil pengujian Tabel 9 nampak semua

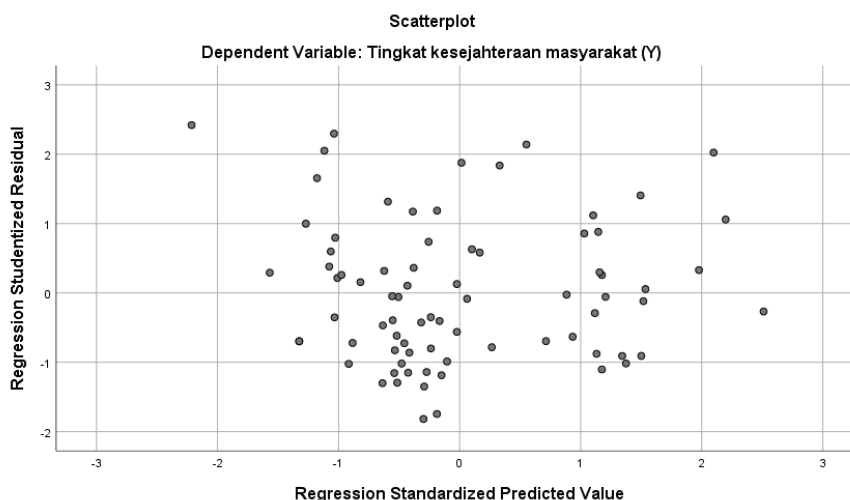
variabel independen memiliki nilai *tolerance* >0,100 dan nilai VIF <10,00 sehingga tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan varian pada residual penelitian. Heteroskedastisitas terjadi saat model regresi terdapat variasi residual yang tidak konsisten. Bila tidak terjadi heteroskedastisitas maka penelitian dapat dikatakan baik. Teknik pada penelitian ini yaitu uji heteroskedastisitas *scatterplots*. Dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas jika titik-titik data tidak membentuk pola tertentu, titik-titik data tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, penyebaran titik data tidak terbentuk pola menyempit maupun gelombang. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

Tabel 9
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.462	4.528		-.102	.919		
akuntabilitas (X1)	.744	.158	.424	4.708	.000	.689	1.451
transparansi (X2)	.198	.172	.109	1.153	.253	.622	1.607
kompetensi (X3)	.614	.171	.368	3.602	.001	.536	1.864



Gambar 3
Grafik Scatterplot

Berdasar Gambar 3, nampak tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, karena titik-titik data tersebar di atas maupun di bawah titik 0 (nol) sumbu Y dan X, selain itu tidak terjadi pola beraturan yang berupa gelombang, melebar atau menyempit.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk melakukan pengujian tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Pengujian ini dihitung dengan melihat perbandingan nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel (t-hitung > t-tabel) maka hipotesis tersebut dapat diterima. Atau hipotesis juga dapat diterima dengan cara melihat nilai signifikansi jika nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05.

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 3,221 lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05.

Berdasar hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis yang pertama diterima.

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,076 lebih kecil dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis yang kedua ditolak. Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 2.450 lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Berdasar hasil pengujian tersebut

Tabel 10
Hasil Uji Parsial Desa Deyangan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.927	6.265		0.946	0.350
akuntabilitas (X1)	0.675	0.209	0.400	3.221	0.003
transparansi (X2)	0.230	0.214	0.161	1.076	0.289
kompetensi (X3)	0.502	0.205	0.362	2.450	0.019

Tabel 11
Hasil Uji Parsial Desa Sambeng

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38.903	10.148		3.834	0.001
akuntabilitas (X1)	-0.110	0.238	-0.080	-0.462	0.647
transparansi (X2)	0.115	0.231	0.085	0.496	0.623
kompetensi (X3)	-0.068	0.294	-0.040	-0.230	0.820

apat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar -0,462 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,647 lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis yang pertama ditolak. Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 0,496 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,623 lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis yang kedua ditolak.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar -0,230 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05. Berdasar hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis yang ketiga ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan

Borobudur Kabupaten Magelang

Hipotesis pertama (H1) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan untuk variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 3,221 lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima dengan begitu artinya Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sedangkan Penelitian yang dilakukan di Desa Sambeng untuk variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar -0,462 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,647 lebih besar dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak dengan begitu artinya Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan memberikan hasil H1 diterima dan berpengaruh positif dalam Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sehingga semakin tinggi Akuntabilitas Dana Desa maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Deyangan telah melaksanakan pertanggungjawaban atas penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan penyajian laporan APBDes dan penyajian rincian penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional desa atau penyelenggaraan desa. Sedangkan Penelitian yang dilakukan di Desa Sambeng memberikan hasil H1 ditolak dan berpengaruh tidak signifikan dalam Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Desa Sambeng belum menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan penyajian laporan APBDes. Selain itu faktor lain seperti karakteristik geografis juga menyebabkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan letak Desa Sambeng yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga masyarakat menjadi kurang untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Meskipun begitu Desa Sambeng merupakan

salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Borobudur namun desa tersebut masih kurang dikenal oleh wisatawan.

Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Kuswanti & Kurnia, 2020), (Yupita & Juita, 2020), dan (Sari & Wahidahwati, 2018) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pertanggungjawaban laporan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan Penelitian (Dewi & Sapari, 2020) menunjukkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Sedangkan secara tidak langsung pembangunan desa merupakan faktor pengaruh besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Hipotesis kedua (H2) menjelaskan bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan untuk variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,076 lebih kecil dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05 maka ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak dengan begitu artinya Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Sambeng untuk variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 0,496 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,623 lebih besar dari 0,05 maka ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak dengan begitu artinya Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan dan Desa Sambeng memberikan hasil H2 ditolak dan berpengaruh tidak signifikan dalam Transparansi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Faktor penyebab hal itu dapat dikarenakan pemerintah desa belum memberikan akses yang terbuka kepada berb-

agai pihak termasuk masyarakat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sehingga prinsip transparansi tidak berjalan dengan semestinya atau dalam hal lain dapat disebabkan adanya kepentingan pribadi atau kelompok. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok dapat menyebabkan terhambatnya kepentingan masyarakat umum sehingga kesejahteraan masyarakat desa tidak dapat terpenuhi. Kepentingan kelompok yang ada di kedua desa tersebut berbeda karena latar belakang desa juga memiliki perbedaan yaitu Desa Deyangan sebagai pusat pendidikan dan Desa Sambeng sebagai desa wisata.

Sejalan dengan penelitian (Wardani & Utami, 2020) yang mengungkapkan bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Terjadinya rasionalitas formal menyebabkan Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal itu menyangkut pola berfikir dalam mengambil keputusan yang memberikan timbal balik positif kepada kelompok yang berkuasa. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah melakukan transparansi hanya sebagai bentuk formalitas sehingga tidak berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang berbeda pada penelitian (Mildawati & Sari, 2018) yang mengungkapkan Transparansi pengelolaan alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu membuktikan pemerintah desa telah memenuhi hak masyarakat melalui transparansi atau keterbukaan maka masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi dan menjalankan pembangunan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Hipotesis ketiga (H3) menjelaskan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan untuk variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 2.450 lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima dengan begitu artinya Kompetensi Aparat Pengelola

Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Sambeng untuk variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki t hitung sebesar $-0,230$ lebih kecil dari nilai t tabel $2,032$ dan nilai signifikansi sebesar $0,820$ lebih besar dari $0,05$ maka ditarik kesimpulan bahwa H_3 ditolak dengan begitu artinya Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Penelitian yang dilakukan di Desa Deyangan memberikan hasil H_3 diterima dan berpengaruh positif dalam Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kualitas atau kompetensi aparat pada pemerintahan desa dalam taraf baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Semakin tinggi Kompetensi Aparat pengelola Dana Desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia di Desa Deyangan bisa dikatakan cukup baik. Ini sejalan dengan latar belakang desa yaitu Desa Deyangan sebagai pusat pendidikan sehingga hal tersebut dapat menjadi pendukung untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Sambeng memberikan hasil H_3 ditolak dan berpengaruh tidak signifikan dalam Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas atau kompetensi aparat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa tidak efektif dan efisien, sehingga dalam melaksanakan pembangunan desa akan terhambat yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang menjadi faktor penghambat kesejahteraan di Desa Sambeng yaitu kualitas Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia pada desa tersebut terbatas yang disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang ada masih kurang memadai dan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Sejalan dengan penelitian (Fauzie *et al.*, 2020) yang mengungkapkan bahwa Kompetensi Pendamping Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung akan lebih percaya dengan aparat pengelola Dana Desa yang memiliki kompetensi maupun pendidikan yang baik. Pada penelitian (Aprilya & Fitria, 2020) mengungkapkan bahwa sebuah instansi pemerintah yang memiliki aparat

dengan kompetensi yang baik maka akan mendorong tercapainya tujuan dari instansi tersebut. Sehingga penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik agar Dana Desa dapat dikelola dengan semestinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sedangkan Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pada Desa Deyangan, variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar $3,221$ lebih besar dari nilai t tabel $2,028$ dan nilai signifikansi sebesar $0,003$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang maka artinya H_1 dinyatakan diterima. Sedangkan pada Desa Sambeng, variabel Akuntabilitas Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar $-0,462$ lebih kecil dari nilai t tabel $2,032$ dan nilai signifikansi sebesar $0,647$ lebih besar dari $0,05$ maka disimpulkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang maka artinya H_1 dinyatakan ditolak.

Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pada Desa Deyangan, variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar $1,076$ lebih kecil dari nilai t tabel $2,028$ dan nilai signifikansi sebesar $0,289$ lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang maka artinya H_2 dinyatakan ditolak. Sedangkan pada Desa Sambeng, variabel Transparansi Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar $0,496$ lebih kecil dari nilai t tabel $2,032$ dan nilai signifikansi sebesar $0,623$ lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan

bahwa Transparansi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang maka artinya H2 dinyatakan ditolak.

Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sedangkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Pada Desa Deyangan, variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki nilai t hitung sebesar 2,450 lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang maka artinya H3 dinyatakan diterima. Sedangkan pada Desa Sambeng, variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa memiliki t hitung sebesar -0,230 lebih kecil dari nilai t tabel 2,032 dan nilai signifikansi sebesar 0,820 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang maka artinya H3 dinyatakan ditolak.

Keterbatasan Penelitian

Jumlah sampel yang diambil untuk masing-masing desa masih sedikit. Pengambilan data dalam jumlah yang sedikit akan mengakibatkan hasil olah data yang kurang akurat. Terdapat kelemahan pada metode pengambilan sampel di masyarakat desa, hal itu dikarenakan pengambilan sampel secara *online* melalui *google form* sehingga hanya dapat menjangkau responden yang memiliki fasilitas secara memadai. Maka untuk responden terutama berusia di atas 40 tahun hanya beberapa yang bisa ikut berpartisipasi.

Saran

Bagi Pemerintah Desa, untuk Pemerintah Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang diharapkan lebih meningkatkan sumber daya manusia masing-masing desa karena kesejahteraan masyarakat

desa masih belum terpenuhi sepenuhnya. Sehingga masyarakat desa diharapkan meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat hidup lebih sejahtera, hal itu dikarenakan sumber daya manusia merupakan landasan untuk membangun pemerintahan maupun perekonomian yang lebih baik agar dapat mengelolanya secara efektif dan efisien. Selain itu khususnya untuk Desa Sambeng diharapkan untuk menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk kepentingan masyarakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penambahan variabel penelitian pada penelitian yang selanjutnya. Peneliti dapat menggunakan Partisipasi Masyarakat Pengelola Dana Desa untuk variabel, bentuk Partisipasi Masyarakat yang dimaksud dapat berupa keikutsertaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan kebijakan yang menyangkut penggunaan Dana Desa. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sumber data penelitian, peneliti dapat menambahkan data selain Desa Deyangan dan Desa Sambeng atau menggunakan seluruh desa yang ada pada masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Borobudur. Pengambilan kuesioner dapat lebih baik jika dilakukan dengan menambah wawancara secara terstruktur sehingga data akan obyektif, lengkap, dan akurat melalui wawancara yang ditujukan untuk pihak pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Boediono. 1992. *Teori pertumbuhan ekonomi*. BPF.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.

- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LP3ES.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Manik, O. J., R, S. J., Sihombing, B., & N, S. A. 2020. *Jurnal Regional Planning*. 9(1).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Sari, A. N., & Wahidahwati. 2018. Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(5), 1–15.
- Spencer, M. L., & Spencer, M. signe. 2007. *Competency at Work. Models for Superior Performance*. Jhon Wiley and Sons Inc.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Kencana.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*.
- Yupita, L., & Juita, V. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>